

Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan “New Southern Policy Plus” di ASEAN Pada Masa Pandemi COVID-19 (Tahun 2020-2021)

Y.A. Wahyudin¹, Wilujeng Eraningtyas¹, Valencia Husni¹

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mataram,
Kota Mataram, NTB, Indonesia, 83115

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mataram,
Kota Mataram, NTB, Indonesia, 83115

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mataram,
Kota Mataram, NTB, Indonesia, 83115

aria_wahyuddin@unram.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to analyze the implementation of South Korea's foreign policy "New Southern Policy Plus" in ASEAN during the COVID-19 pandemic from November 2020 to December 2021. The author finds that the motive for launching the New Southern Policy Plus is influenced by domestic and international sources including emerging global crises or issues, socio-economic conditions of society, government structures and responsibilities, as well as curriculum vitae and views of decision makers. In addition, the form of implementation of the New Southern Policy Plus is a new adjustment in the South Korea-ASEAN cooperation relationship to face the health and socio-economic challenges that come along with the COVID-19 pandemic. This study uses the concept of foreign policy and the concept of international cooperation to answer research questions because both are able to explain the implementation of this policy. The author also finds the fact that the launch of the New Southern Policy Plus is a step by South Korea to maintain the continuity of its cooperative relationship with ASEAN which had previously been established through the New Southern Policy as evidenced by the continued adherence to the three pillars of community (people, peace, prosperity). South Korea-ASEAN cooperation relations is an absolute gain with the priority of health and economic partnerships.

Keywords: Foreign Policy, International Cooperation, New Southern Policy Plus, COVID-19

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan luar negeri Korea Selatan “New Southern Policy Plus” di ASEAN pada masa pandemi COVID-19 rentang waktu November 2020 hingga Desember 2021. Penulis menemukan bahwa motif diluncurkannya New Southern Policy Plus dipengaruhi oleh sumber domestik dan internasional yang mencakup krisis atau isu global yang sedang naik, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, struktur dan pertanggungjawaban pemerintah, serta riwayat hidup dan pandangan pembuat keputusan. Selain itu, bentuk implementasi dari New Southern Policy Plus adalah dengan adanya penyesuaian baru dalam hubungan kerja sama Korea Selatan-ASEAN guna menghadapi tantangan kesehatan dan sosial-ekonomi yang datang bersamaan dengan pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan konsep kerja sama internasional untuk menjawab pertanyaan penelitian karena keduanya mampu menjelaskan implementasi kebijakan ini. Penulis juga menemukan fakta bahwa peluncuran New Southern Policy Plus merupakan langkah Korea Selatan untuk tetap mempertahankan kesinambungan hubungan kerja samanya dengan ASEAN yang sebelumnya telah terjalin melalui New Southern Policy terbukti dari tetap dipegangnya tiga pilar komunitas (people, peace, prosperity). Hubungan kerja sama Korea Selatan-ASEAN bersifat *absolute gain* dengan prioritas kemitraan kesehatan dan ekonomi.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri, Kerja Sama Internasional, New Southern Policy Plus, COVID-19

PENDAHULUAN

Korea Selatan (Korea Selatan) merupakan salah satu negara maju yang berada di kawasan Asia Timur, berbatasan dengan Korea Utara (Korut), China, dan Jepang. Berdasarkan sejarahnya, diplomasi Korea Selatan cenderung stagnan dengan berfokus pada kekuatan-kekuatan besar di sekitar wilayah Semenanjung Korea. China, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat (AS) adalah empat kekuatan besar yang berpengaruh terhadap Korea Selatan, baik dalam sektor ekonomi, strategis hingga peran integral dalam penentuan kebijakan luar negeri dan keamanan tradisional Korea Selatan. Tantangan terbesar kebijakan luar negeri Korea Selatan pada tiap pemerintahan adalah bagaimana kemudian unifikasi dua Korea dapat tercapai. (Botto, 2021b) Hubungan Korea Selatan dengan empat negara mitra terbesarnya tersebut semakin kompleks akibat pengembangan nuklir Korut di Semenanjung Korea yang berujung pada pemasangan *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) atau sistem rudal canggih pendeteksi rudal balistik jarak pendek atas instruksi AS pada tahun 2016 (Iriawan, 2017, pp. 104–105).

Keputusan Korea Selatan tersebut mendapatkan penolakan keras dari China dengan alasan kepentingan keamanan nasional negaranya. China menganggap bahwa cakupan radar THAAD dapat masuk ke wilayah bagian timur China, di mana wilayah ini adalah tempat penyimpanan barang-barang militer sistem pertahanan China (Putri, 2019, p. 7). Penolakan ini berujung pada renggangnya hubungan bilateral kedua negara hingga aksi pemboikotan masyarakat China atas produk dan tayangan asal Korea Selatan (KBS World, 2017). Polemik pemasangan THAAD secara lebih luas mengakibatkan China dan AS mengalami gesekan kekuatan di kawasan Asia Timur. Hal ini juga berdampak pada sulitnya Korea Selatan dalam mengambil keputusan terkait keberlangsungan negaranya karena mendapatkan tekanan dari negara satu kawasannya, China, juga AS sebagai sekutu sekaligus negara hegemon ekstraregional di kawasan. Korea Selatan berada di tengah kepentingan negara-negara mitra terbesarnya yang mengambil keuntungan politik dan ekonomi dari ketidakstabilan keamanan di Asia Timur.

Kerentanan ekonomi dan keamanan yang ada membuat pemerintahan Korea Selatan yang dipimpin oleh presiden terpilih, Moon Jae In (Moon) pada tahun 2017 mengumumkan kebijakan luar negeri baru, *New Southern Policy* (NSP) sebagai agenda awal masa pemerintahannya. Usulan kebijakan luar negeri ini digagas oleh Moon di tengah dominasi empat negara mitra terbesar Korea Selatan serta permasalahan keamanan di Semenanjung Korea akibat pengembangan nuklir Korut, termasuk polemik THAAD yang berimbas pada perekonomian Korea Selatan (Pujayanti, 2019, p. 8).

NSP merupakan kebijakan dengan inisiatif untuk memperluas hubungan ekonomi, sosial, dan budaya antara Korea Selatan, *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dan India dengan tiga pilar utama 3P, yakni *People*, *Peace*, dan *Prosperity* sekaligus mendiversifikasi kemitraan ekonomi dan strategis Korea Selatan di kawasan (Presidential Committee on New Southern Policy, 2018). Adanya NSP

mengubah hubungan diplomatik Korea Selatan dengan ASEAN ke arah yang lebih dinamis lagi, termasuk juga ekonomi, sosial budaya, dan kerja sama strategis lainnya menjadi lebih intensif. Penguatan hubungan baik Korea Selatan, ASEAN, dan India diharapkan dapat berkontribusi terhadap perdamaian internasional dan sektor-sektor penting lainnya (Zahra, 2021). Penguatan ini selaras dengan tujuan agar hubungan Korea Selatan dengan ASEAN dan India naik ke tingkat yang sama dengan empat negara mitra terbesar Korea Selatan.

Adapun maksud dari tiga pilar NSP sebagai fokus kebijakan adalah pertama, pilar *people* menandakan hubungan Korea Selatan, ASEAN, dan India sebagai sebuah komunitas yang berfokus pada rakyat dengan menghubungkan *people to people* dan *minds to minds* dalam setiap agendanya dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Korea Selatan, ASEAN, dan India yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berlandas kepentingan bersama komunitas dapat terlaksana (Presidential Committee on New Southern Policy, 2020, p. 9). Kedua, pilar *peace* menandakan komunitas yang mendukung agenda keamanan dan perdamaian regional. Pilar *peace* merepresentasikan harapan bersama untuk mewujudkan komunitas bersama yang bebas dari rasa takut akan ancaman (Presidential Committee on New Southern Policy, 2020, p. 9). Ketiga, pilar *prosperity* yang menandakan komunitas yang menjalain kerja sama ekonomi saling menguntungkan di masa depan guna mewujudkan kemakmuran bersama (Asia-Pacific Center for Security Studies, 2020, pp. 4–5).

Negara-negara anggota ASEAN dan India sendiri sebagai negara target NSP memiliki jumlah populasi 2 miliar orang dengan rata-rata usia penduduk 30 tahun. Hal ini menjadikan ASEAN dan India sebagai rekan kerja yang penting bagi Korea Selatan, terutama pada masa pemerintahan Presiden Moon. Selain itu, melalui NSP, komite berusaha untuk menyebarkan kebudayaan *Hallyu* 'budaya populer Korea' di pasar internasional (Ministry of Foreign Affairs, 2020), mengingat adanya potensi besar dari promosi *k-pop*, *k-drama*, *k-beauty*, dan *k-food* (Asia-Pacific Center for Security Studies, 2020, pp. 7–9). ASEAN dan India juga memiliki pasar yang menjanjikan untuk membangun *platform* inovasi terbuka global di era *Fourth Industrial Revolution*, termasuk *Fifth Generation (5G)*, *Information Technology (IT)*, dan *smart city* (Presidential Committee on New Southern Policy, 2020, p. 9). Hal ini jelas menandakan bahwa NSP menjadi tonggak penting bagi Korea Selatan guna meningkatkan peluang bisnis bagi ketiga pihak dengan mengadopsi sebuah model kerja sama yang dapat memenuhi kepentingan masing-masing negara mitra.

Pembahasan NSP berlanjut lebih serius juga pada pertemuan KTT ASEAN-Korea Selatan di Busan pada 25-26 November 2019 dan KTT Mekong-Korea Selatan pada 27 November 2019. Puncak pertemuan Korea Selatan dengan negara-negara anggota ASEAN terkait pembahasan NSP adalah dengan target volume perdagangan Korea Selatan-ASEAN senilai US\$ 200 miliar di tahun 2020 dan Korea Selatan-India senilai US\$ 50 miliar di tahun 2030. Adapun estimasi kunjungan dari Korea Selatan ke negara-negara target NSP dan sebaliknya sebanyak 15 juta tiap tahun terhitung sejak tahun 2020 (Asia-Pacific Center for Security Studies, 2020, pp. 12–13). Namun, merebaknya pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) pada awal tahun 2020 lalu

sempat membuat negara-negara di dunia (termasuk Korea Selatan, negara-negara anggota ASEAN dan India) fokus pada penanganan dalam negeri masing-masing (Thuzar, 2012, p. 3).

Keberhasilan Korea Selatan menangani pandemi kemudian menjadi titik balik bagi NSP, di mana pada KTT ke-21 ASEAN-Korea Selatan yang digelar secara virtual pada 12 November 2020, Presiden Moon mengumumkan adanya peluncuran New Southern Policy Plus (NSP+) sebagai bentuk pembaruan dari NSP. Korea Selatan melalui NSP+ menawarkan *platform* bagi negara-negara mitra NSP untuk menghadapi empat tantangan utama selama dan setelah pandemi COVID-19, yakni pertama adalah penyebaran COVID-19 yang sangat cepat; kedua adalah peningkatan nasionalisme dan proteksionisme di seluruh dunia yang dapat mengancam kebebasan dan multilateralisme ekonomi global; ketiga adalah percepatan transformasi digital akibat pandemi COVID-19; dan keempat adalah peningkatan urgensi keamanan non-tradisional, tidak hanya pandemi COVID-19 tetapi juga isu-isu *transborder* 'lintas batas negara', seperti pemanasan global, bencana alam, dan pencemaran laut (Presidential Committee on New Southern Policy, 2020, pp. 11–12).

Untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut, Korea Selatan menerapkan lima prinsip untuk menjalankan NSP+. Pertama, *people-centrism*. Korea Selatan akan memastikan program-program kerja sama di bawah kerangka NSP+ akan menghasilkan keuntungan yang nyata bagi negara-negara mitra NSP. Kedua, *reciprocity* atau timbal-balik. Korea Selatan tidak akan memenuhi kepentingan nasionalnya saja, tetapi justru berkolaborasi dengan negara-negara mitra untuk mendapat keuntungan bersama. Hal ini diharapkan agar tujuan perdamaian dan kemakmuran bersama dapat selaras dengan ASEAN Comprehensive Recovery Framework dan Act East Policy milik India. Ketiga, strategi memilih area konstentrasi. Korea Selatan akan mencoba menemukan dan melakukan program-program untuk upaya bersama di bawah tujuh inisiatif baru yang ditambahkan pada NSP (Presidential Committee on New Southern Policy, 2020, pp. 12–13). Keempat, *openness* 'keterbukaan'. Korea Selatan akan secara aktif ikut dengan komunitas internasional untuk perdamaian dan kemakmuran kawasan NSP, baik Korea Selatan, ASEAN dan India. Kelima, *continuity* 'keberlanjutan'. Pemerintah Korea mengkonsolidasikan fondasi kelembagaan untuk memastikan implementasi NSP tetap berjalan konsisten dan berkelanjutan bahkan setelah masa pemerintahan Presiden Moon selesai (Presidential Committee on New Southern Policy, 2020, p. 13).

Adapun tambahan tujuh inisiatif baru dalam kerangka NSP+ guna merespon tantangan-tantangan akibat adanya pandemi COVID-19, yakni kerja sama yang komprehensif dalam hal kesehatan publik pasca pandemi COVID-19; membagikan informasi terkait model pendidikan ala Korea Selatan dan dukungan terhadap pengembangan SDM; mempromosikan pertukaran budaya dua arah; membangun dasar hubungan saling menguntungkan dalam hal perdagangan dan investasi yang berkelanjutan; mendukung pengembangan infrastruktur desa dan perkotaan; kerja sama dalam hal industri masa depan untuk kemakmuran bersama; serta kerja sama terkait promosi keselamatan dan perdamaian di tingkat internasional (Presidential Committee on New Southern Policy, 2020, p. 13).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemerintah Korea Selatan mengambil keputusan untuk meluncurkan NSP+ sebagai bentuk *upgrade* NSP. NSP pada awalnya diluncurkan sebagai alternatif kebijakan luar negeri Korea Selatan di tengah permasalahan di Semenanjung Korea dan gesekan kekuatan China-AS di kawasan yang berdampak buruk bagi ekonomi Korea Selatan. Korea Selatan berusaha mencari jalan keluar dengan mencoba fokus pada bidang ekonomi dan sosial dengan menjalin kerja sama internasional untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian karena adanya perubahan signifikan secara global akibat pandemi COVID-19, Korea Selatan memperbarui NSP menjadi NSP+ dengan pertimbangan bahwa dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 lebih dari sektor kesehatan publik saja, tetapi secara tidak langsung mencerminkan tantangan ekonomi yang sebenarnya, tak hanya bagi Korea Selatan sendiri, tapi juga negara-negara mitra NSP. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai strategi pemerintah Korea Selatan yang mengambil keputusan untuk meluncurkan NSP+ (bentuk *upgrade* NSP) sebagai respon atas adanya pandemi COVID-19 melalui pendekatan konsep kebijakan luar negeri. Penulis juga akan melihat bagaimana implementasi yang dilakukan Korea Selatan dalam menjalankan inisiatif kerja sama dalam NSP+ dengan fokus hubungannya dengan ASEAN pada masa pandemi COVID-19 melalui pendekatan konsep kerja sama internasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, jurnal berjudul “*New Southern Policy*” Korea’s Newfound Ambitions in Search of Strategic Autonomy” yang ditulis oleh Choe Wongi pada tahun 2021. Jurnal ini menjelaskan bahwa NSP merupakan kebijakan luar negeri yang paling sukses pada masa pemerintahan Presiden Moon. NSP menjadi ambisi *middle power* terbesar Korea Selatan untuk mencari otonomi strategis dengan mengambil peran internasional sebagai pelopor kerja sama internasional bersama ASEAN dan India. Berkaca dari sejarah perkembangan ekonomi dan teknologi Korea Selatan yang terus meningkat, negara-negara berkembang banyak yang menjadikan Korea Selatan sebagai panutan dalam sektor pembangunan. Sehingga inisiatif NSP yang berfokus aspek sosial dan ekonomi ini menjadi penghubung utama Korea Selatan, ASEAN dan India. Selain itu, motif lain dibalik NSP adalah ketergantungan ekonomi Korea Selatan terhadap China. Hubungan tidak baik Korea Selatan dan China sejak adanya pemasangan THAAD menjadi pemicu awal usaha Korea Selatan untuk mendiversifikasi sektor perekonomiannya di luar China. Fakta lain juga menunjukkan bahwa Korea Selatan tidak memberikan respon yang baik terhadap persaingan AS dan China. Korea Selatan tidak ingin memihak salah satunya maupun tidak ingin terlibat di dalam persaingan ini. Korea Selatan merasa bahwa kebanyakan negara di Asia Tenggara juga memiliki pemahaman seperti ini, sehingga terdapat minat yang sama. Bersama dengan ASEAN dan India, Korea Selatan berusaha untuk melindungi diri dari risiko ketidakpastian geopolitik yang dapat mengancam perekonomian negaranya (Wongi, 2021, pp. 5–8).

Dari jurnal ini didapati juga bahwa ambisi *middle power* Korea Selatan melalui NSP ternyata memiliki batasan, yakni geopolitik dan *balance diplomacy* ‘diplomasi berimbang’. Agenda NSP sejak awal bukanlah kerja sama strategis yang berhubungan

dengan keamanan regional Korea Selatan di Asia Timur, melainkan berfokus pada pembangunan. Sehingga dirasa cukup memaksakan diri jika Korea Selatan mengambil peran *middle power* yang dominan sebagai mitra strategis bagi kawasan Asia Selatan. Meskipun terdapat pilar *peace* pada NSP, nyatanya isu-isu strategis dikesampingkan dan hanya berfokus pada isu-isu non-tradisional, sehingga dalam konflik Laut China Selatan misalnya, Korea Selatan tidak mampu untuk memberikan kontribusi apapun. Batasan yang lain adalah akibat dari praktik diplomasi berimbang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Korea Selatan tidak memihak AS maupun China karena tetap ingin mempertahankan aliansinya dengan AS dan kemitraannya dengan China. Tindakan ini kemudian disebut sebagai diplomasi berimbang, yang menyebabkan Korea Selatan bermain aman dengan menjalin kerja sama pembangunan dengan ASEAN dan India melalui NSP. Fokus pembangunan termasuk dalam batas aman diplomasi berimbang, sehingga dapat dipahami jika isu-isu keamanan strategis kurang diperhatikan dalam NSP. Daripada ikut dalam pusaran persaingan AS dan China, Korea Selatan memutuskan untuk mengambil upaya yang lebih besar untuk fokus pada kepentingan nasional negaranya serta nilai-nilai universal termasuk prinsip-prinsip hukum internasional yang terangkum dalam NSP (Wongi, 2021, pp. 16–19). Jurnal Choi Wongi ini selaras dengan penelitian penulis yang melihat bahwa motif diluncurkannya NSP+ adalah faktor domestik, yakni penurunan nilai perdagangan Korea Selatan-China yang berdampak bagi perekonomian Korea Selatan, serta faktor internasional, yakni persaingan AS-China hubungannya dengan persaingan hegemon global.

Kedua, jurnal berjudul *“New Emphasis Needed: South Korea’s New Southern Policy and ASEAN,”* yang ditulis oleh Lee Jaehyon pada tahun 2020. Jurnal ini menjelaskan tentang NSP yang dikeluarkan oleh Korea Selatan berkaitan dengan hubungannya dengan ASEAN, yakni bahwa inisiatif Korea Selatan ini memiliki beberapa kemajuan dalam meningkatkan hubungan keduanya, namun masih tetap terdapat beberapa catatan yang masih harus dikaji ulang. Dari tiga pilar yang menjadi arah kebijakan ini, penulis mendapati bahwa pilar *peace* ‘perdamaian’ tidak memiliki porsi yang seimbang dalam pelaksanaan kerja samanya dibanding dua pilar lainnya yang memang sudah secara signifikan memberikan keuntungan bagi Korea Selatan dan ASEAN. Sehingga kerja sama di bidang politik-keamanan agaknya harus disikapi dengan baik jika ingin membangun hubungan kerja sama yang lebih intensif. Beberapa alasan mengapa kemudian kerja sama di bidang ini masih tergolong lemah adalah perbedaan fokus masalah keamanan tradisional keduanya, dimana ASEAN berfokus pada kawasan Asia Tenggara dan Korea Selatan berfokus pada keamanan di Semenanjung Korea. Walaupun kemitraan keduanya dalam payung NSP tidak berangkat dari faktor keamanan tradisional, terdapat poin kerja sama untuk membangun perdamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea yang dipaparkan pada pilar *peace*. Sehingga perlu adanya jalur inovatif untuk menyelaraskan kerja sama pada poin ini (Jaehyon, 2020, p. 3).

Lee Jaehyon memberikan tiga alasan apa kemudian yang salah dari kerja sama antara Korea Selatan dan ASEAN di bawah kerangka NSP. Pertama, Korea Selatan lebih banyak memberikan perhatian pada kerja sama di bidang sosial-ekonomi karena

kerja sama di ini dalam kaca mata politik domestik lebih mudah diterima oleh negara lain karena hasil yang secara nyata dapat dirasakan daripada bidang politik-keamanan. Hasil seperti nilai perdagangan dan investasi yang meningkat, surplus perdagangan, wisatawan yang meningkat, dan pertukaran budaya lebih mudah menarik perhatian publik domestik, sedangkan kerja sama politik-keamanan terlihat abstrak dan jauh dari kehidupan sehari-hari publik awam. Kedua, Korea Selatan dan negara-negara anggota ASEAN sensitif dengan kerja sama dalam bidang keamanan-strategis dan pertahanan karena berkaitan langsung dengan kedaulatan negara. NSP sendiri merupakan kebijakan yang dibuat untuk membuat Korea Selatan dari permasalahan Semenanjung Korea dan kompleksitas empat negara mitra terbesarnya, tapi manfaat dari kerja sama di bidang keamanan antara negara *middle power* seperti Korea dan negara-negara regional, seperti anggota ASEAN tidak dapat mengimbangi biaya yang harus dikeluarkan untuk kerja sama pada bidang ini. Sehingga kerja sama keamanan dengan negara adidaya seperti AS atau China jauh diminati. Ketiga, sebagai negara *middle power* yang sedang berkembang, Korea Selatan tidak mengambil posisi strategis yang jelas akan persaingan AS dan China. Hal ini menyebabkan negara-negara anggota ASEAN cenderung tidak ingin memberikan kepercayaan yang lebih dalam urusan keamanan-strategis (Jaehyon, 2020, pp. 4–5). Jurnal ini selaras dengan penelitian penulis dalam hal implementasi NSP+ yang masih menilai bahwa pilar “people” dan “prosperity” menjadi dasar prioritas hubungan Korea Selatan-ASEAN di masa pandemi COVID-19.

Ketiga, jurnal berjudul “*The New Southern Policy Plus: What’s New and What’s Next?*” yang ditulis oleh Moe Thuzar pada tahun 2021. Jurnal ini menjeleskan tentang dimensi terbaru yang dimiliki oleh NSP+ sebagai bentuk pembaharuan dari NSP. NSP+ diluncurkan oleh Korea Selatan sebagai bentuk respon pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perubahan signifikan pada sektor ekonomi-sosial serta politik Korea Selatan, ASEAN, dan India. NSP awalnya terbentuk dari alasan strategis, yakni keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Korea Selatan melalui *brand-brand* ‘merek-merek’ besar yang terkenal di Asia Tenggara dan India, yang kemudian meluas menjadi kebijakan yang berfokus pada sosial, ekonomi, dan perdamaian. Hal inilah yang mendorong NSP+ untuk hadir merespon kebutuhan yang timbul akibat pandemi COVID-19. Faktor *plus* menjadi kesempatan baik bagi Korea Selatan untuk merealisasikan apa-apa saja yang sebelumnya sudah diagendakan dalam kerangka NSP, namun belum atau tidak tercapai (Thuzar, 2012, pp. 1–2).

NSP+ berfokus pada pemulihan selama dan persiapan setelah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, terjadapat tujuh inisiatif baru yang ditambahkan untuk membangun kembali sistem ekonomi dan kesehatan masyarakat serta mengatasi tantangan non-tradisional dan keamanan manusia. NSP+ lebih fokus kepada pilar *people* karena yang terdampak adalah masyarakat itu sendiri, mulai dari dampak kesehatan, pendidikan dan SDM, yang mana menjadikan kekhawatiran-kekhawatiran tersebut adalah tujuan utama dari tujuan pemulihan yang ingin dicapai. Adapun tantangan dalam mencapai pemulihan ini adalah sentimen-sentimen atau harapan masyarakat yang terlalu tergesa-gesa untuk kembali menjalankan aktifitas normal seperti sebelum adanya COVID-19. Namun, *new normal* ‘normal baru’ di kemudian

hari yang dinantikan pastinya sangat dinamis karena banyak hal yang pastinya berubah dan berbeda akibat virus COVID-19, sehingga penyesuaian akan kebutuhan yang mungkin dibutuhkan bisa menjadi sebuah norma baru. Adapun tiga dimensi yang kiranya perlu diperhatikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan NSP+ adalah pertama, mencari tahu kebutuhan mendesak ASEAN pada sektor-sektor strategis agar Korea Selatan bisa membagikan dan mengadaptasi praktik dalam negaranya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua, menyelaraskan tujuan NSP+ dengan agenda bilateral Korea Selatan untuk negara-negara anggota ASEAN untuk memastikan kecocokan dan kesinambungan, baik dalam tingkat regional dan internasional. Ketiga, melembagakan mekanisme peninjauan berkala atau jangka menengah untuk mengkaji ulang mekanisme NSP+ guna membantu identifikasi awal terhadap prioritas agenda yang sekiranya mungkin harus direvisi atau ditambahkan dengan pertimbangan kebutuhan dan kekhawatiran yang ada (Thuzar, 2012, pp. 3–4). Hal tersebut selaras dengan penelitian penulis mengenai bahasan identifikasi bentuk-bentuk kerja sama Korea Selatan-ASEAN yang variatif pada masa pandemi COVID-19.

Keempat, tesis berjudul “*South Korea as Middle Power: A Case Study of South Korea-ASEAN Relations*” yang ditulis oleh Hatice Çelik pada tahun 2017. Tesis ini menjelaskan tentang upaya Korea Selatan mengoperasionalkan identitas *middle power* atau kekuatan menengahnya untuk membentuk kebijakan luar negeri berdasarkan hubungannya dengan ASEAN. Hubungan Korea Selatan sebagai *middle power* dan ASEAN sebagai regionalisme dianalisis melalui perspektif konstruktivis. Menyusul Korea Selatan yang terjebak dalam situasi dilema keamanan di Semenanjung Korea, agenda kebijakan luar negeri Korea Selatan hanya berorientasi pada sektor keamanan. Hubungan baik dengan negara-negara di Asia Tenggara kemudian nampaknya dilihat sebagai lingkungan yang bagus untuk Korea Selatan meningkatkan ambisi dan menunjukkan kemampuan *middle power*nya di tingkat internasional.

Korea Selatan tidak melakukan banyak tindakan terkait permasalahan keamanan di Asia Tenggara, utamanya permasalahan Laut China Selatan karena harus menjaga posisi netral di tengah negara-negara besar seperti AS dan China yang merupakan mitra utama Korea Selatan. Perilaku Korea Selatan ini adalah salah satu dari enam prinsip *middle power diplomacy* yang terus dipegang, dimana berusaha untuk mengurangi ketegangan dan ketidakpercayaan di antara kekuatan besar serta berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian di kawasan. Pada ranah ekonomi, Korea Selatan masuk dengan melakukan kerja sama-kerja sama ekonomi atau *agreement* ‘perjanjian’ maupun *free trade area* ‘area perdagangan bebas’ dengan ASEAN. Serta pada ranah sosial dan budaya, Korea Selatan melakukan langkah-langkah pertukaran budaya, *platform* kerja sama pertukaran pelajar hingga penyelenggaraan festival-festival budaya (Çelik, 2017, pp. 49–50).

Hubungan Korea Selatan dan ASEAN di atas adalah mengikuti pola politik luar negeri ASEAN. Motif utamanya adalah orientasi akan kepentingan ekonomi serta sikap saling menghormati dan menghargai hubungan sosial budaya. Korea Selatan mungkin bisa menjadi panutan dalam sektor pembangunan ekonomi, sosial dan budaya serta agenda *setter* ‘penyetel’ dalam penyelesaian masalah lingkungan, bantuan teknis ataupun kemanusiaan, tetapi tidak dengan keamanan karena kekhawatiran akan

permasalahan keamanan di Semenanjung Korea dengan Korut (Çelik, 2017, p. 101). Tesis Hatice Çelik ini membantu penelitian penulis dalam hal memahami pola hubungan Korea Selatan-ASEAN yang sudah terbentuk sebelum diluncurkannya NSP+.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kebijakan luar negeri Korea Selatan, khususnya implementasi “New Southern Policy Plus” (NSP Plus), di negara-negara ASEAN selama masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami dinamika kebijakan luar negeri yang diimplementasikan dalam konteks pandemi, serta dampak sosial-politik yang timbul dari kebijakan tersebut. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data sekunder, yang mencakup studi literatur, laporan resmi pemerintah Korea Selatan, dokumen kebijakan luar negeri, serta artikel-artikel jurnal yang relevan. Sumber-sumber ini dipilih karena memberikan gambaran mendalam mengenai perkembangan kebijakan NSP Plus, serta dampaknya terhadap hubungan Korea Selatan dengan negara-negara ASEAN dalam konteks pandemi COVID-19. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), di mana penulis mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam kebijakan NSP Plus, serta bagaimana kebijakan tersebut beradaptasi dengan tantangan pandemi. Penelitian ini juga mengkaji respons negara-negara ASEAN terhadap kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap kerjasama ekonomi dan kesehatan di kawasan.

Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan luar negeri Korea Selatan selama masa krisis global, khususnya dalam konteks hubungan internasional dengan negara-negara ASEAN.

KERANGKA PENELITIAN

KONSEP KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Kebijakan luar negeri merupakan istilah yang dipakai untuk mengidentifikasi keputusan, strategi serta interaksi yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lain. Kebijakan luar negeri menjadi tonggak awal suatu negara dalam memenuhi kepentingan nasional dan menetapkan posisinya di antara negara-negara di dunia (Study et al., 2018). Dalam banyak literasi dijelaskan bahwa kebijakan luar negeri adalah kepanjangan tindakan dari politik domestik. Sehingga keputusan dalam pengambilan kebijakan luar negeri ditentukan oleh dua faktor, yakni domestik (internal) dan internasional (eksternal). Ada juga pendapat bahwa politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri adalah dua hal berbeda dan berdiri sendiri. Bisa saja berhubungan atau saling bergantung satu sama lain atau juga saling tumpang tindih. Namun, determinan kebijakan luar negeri satu negara dengan negara lain dapat dibidang bervariasi tergantung lingkungan politik negara tersebut. Ada negara yang melihat faktor internasional sebagai determinan yang paling utama dan mendesak, ada

juga negara yang melihat faktor domestik sebagai determinan yang lebih penting (Study et al., 2018).

Secara lebih detail, James N. Rosenau membagi empat sumber yang dapat menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri, yaitu: (Rosenau et al., 1976, pp. 15–18)

a. *Systemic sources* ‘sumber sistemik’,

Sumber sistemik berasal dari lingkungan internasional atau eksternal suatu negara. Faktor struktur hubungan dan pola aliansi yang terbentuk antara negara-negara di dunia serta situasi eksternal, seperti isu terkini yang sedang naik atau krisis yang sedang terjadi merupakan sumber sistemik dalam pengambilan keputusan luar negeri. Terkait pembahasan dalam penelitian skripsi ini, pandemi COVID-19 dan rivalitas AS-China adalah yang paling utama dalam peluncuran NSP+.

b. *Societal sources* ‘sumber masyarakat’,

Sumber masyarakat berasal dari lingkungan domestik. Cakupan dari sumber ini adalah pembangunan ekonomi, struktur sosial dan opini publik, serta budaya dan sejarah. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan kemampuan negara untuk kebutuhan negaranya sendiri, dimana hal ini secara tidak langsung mendasari kepentingan nasional suatu negara untuk berhubungan dengan negara lain. Struktur sosial berkaitan SDM yang dimiliki suatu negara atau konflik dan harmoni masyarakatnya, sedangkan opini publik merujuk pada perubahan sentimen masyarakat terhadap lingkungan internasional. Budaya dan sejarah yang berkaitan dengan nilai, tradisi, dan pengalaman masa lampau yang menjadi dasar hubungan antar anggota masyarakat. Pembatasan sosial dan standar regulasi ketat berdasarkan pengalaman gelombang pandemi sebelumnya telah mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi dan kesehatan mental masyarakat Korea Selatan, yang sedikit banyak menjadi salah satu konsen dalam pengambilan kebijakan NSP+.

c. *Governmental sources* ‘sumber pemerintah’,

Sumber pemerintahan berasal dari lingkungan domestik. Sumber ini terdiri dari faktor pertanggungjawaban politik dan struktur pemerintahan. Kedua faktor tersebut mencakup pertanggungjawaban politik, seperti pemilu, kompetisi antar partai politik, dan kemampuan pembuat keputusan untuk merespon situasi eksternal. Merebaknya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dirasa paling tepat untuk pemerintahan Moon memperbaharui NSP menjadi NSP+ sebagai bentuk respon dari situasi eksternal.

d. *Idiosyncratic sources* ‘sumber idiosinkratik’,

Sumber idiosinkratik berasal dari lingkungan domestik, yang berkaitan dengan kepribadian, pengalaman, bakat, dan nilai-nilai yang diyakini oleh pembuat keputusan, yang mempengaruhi persepsi dan perilakunya terhadap kebijakan luar negeri. Lebih luasnya, persepsi seorang elit politik sebagai pembuat keputusan mencakup tentang keadaan yang secara alamiah terjadi dari lingkungan internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai. Keyakinan Presiden Moon

bahwa masyarakat adalah faktor terpenting dalam menjalankan sebuah kerja sama menjadikan “masyarakat” adalah aspek terpenting yang harus terlebih dahulu diselamatkan, sehingga pembaharuan NSP+ sangat dibutuhkan untuk mendukung berjalannya kebijakan ini di masa sekarang dan akan datang.

Empat sumber perumusan kebijakan luar negeri menurut Rosenau ini menjadi dasar untuk melihat mengapa Korea Selatan memperluas kerjasamanya dengan ASEAN dan India dari NSP dan diperluas menjadi NSP+ pasca pandemi COVID-19 dengan melihad dari berbagai sektor.

KONSEP KERJA SAMA INTERNASIONAL

Adanya saling ketergantungan (interdependensi) antar negara-negara di dunia karena kebutuhan domestik masing-masing mengharuskan kerja sama internasional disepakati. Kerja sama internasional memiliki definisi persetujuan antar dua negara atau lebih dalam memanfaatkan persamaan kepentingan mereka, dengan harapan bahwa kebijakan atau kesepakatan yang diputuskan oleh negara lain dapat membantu negara tersebut untuk mencapai kepentingannya (Holsti, 1988, pp. 652–653). James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff mengartikan kerja sama internasional mengarah pada pengertian usaha bersama yang dilakukan individu atau kelompok manusia dengan maksud mencapai tujuan kolektif. Inisiatif kerja sama dapat muncul dari komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau keinginan terhadap pemenuhan kepentingan pribadi. Sehingga poin penting dari kerja sama internasional adalah pemenuhan kepentingan pribadi masing-masing individu atau kelompok yang terlibat, dimana hasil yang menguntungkan kedua pihak ini didapatkan dengan bekerja sama alih-alih dengan usaha sendiri atau bersaing satu sama lain (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997, p. 419).

Dalam membentuk sebuah kerja sama internasional, setiap negara sudah memiliki tujuan dan kepentingannya masing-masing yang diuraikan dalam rumusan kebijakan luar negeri. Sehingga atas dasar kebijakan, negara-negara memutuskan untuk melakukan kerja sama. Dengan kata lain, kerja sama internasional merupakan upaya suatu negara untuk memanfaatkan negara atau pihak lain dalam proses pemenuhan kepentingan dan kebutuhannya. Kerangka kerja sama internasional dapat berupa kerja sama multilateral (lebih dari dua negara) dan kerja sama bilateral (antar dua negara) (Rudy, 2022, p. 27). Dalam penelitian skripsi ini, tujuh inisiatif yang dimasukkan oleh pemerintah Korea Selatan dalam NSP+ adalah kepentingan nasional sekaligus kepentingan bersama yang coba dibawa Korea Selatan dalam kebijakan ini, agar kerja samanya dengan mitra NSP tetap berjalan optimal pada masa pandemi COVID-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PELUNCURAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN “NEW SOUTHERN POLICY PLUS” DI MASA PANDEMI COVID-19

Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan besar pada tatanan

internasional. Di tengah persaingan AS-China yang semakin memanas karena perdebatan asal mula pandemi, negara *middle power* seperti Korea Selatan mengambil peran lebih dengan berinisiatif mengisi kekosongan pemimpin global dengan membantu mengkoordinasi kebijakan fiskal dan moneter, serta mendanai usaha pemulihan kesehatan global. Penyebaran kasus COVID-19 di Korea Selatan yang ditangani dengan baik oleh pemerintah juga telah membawa negara ini mendapat pengakuan secara internasional. Pengakuan ini menjadi penting karena dapat membangun citra baik Korea Selatan yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan pengaruh dan *soft power* Korea Selatan pada kebijakan prioritas lainnya.

Salah satu respon cepat yang dilakukan Korea Selatan di masa pandemi adalah melihat peluang kerja sama bilateral dan multilateral. NSP yang merupakan inisiatif kebijakan luar negeri era pemerintahan Presiden Moon terdampak karena pandemi, menyebabkan banyak kerja sama harus ditunda akibat pembatasan-pembatasan yang timbul akibat adanya pandemi, sehingga perlu adanya alokasi dana bantuan kesehatan dan pembangunan untuk mitra NSP. Menindaklanjuti hal ini, Korea Selatan kemudian meluncurkan NSP+ sebagai bentuk *upgrade* dari NSP, dengan menambahkan inisiatif-inisiatif baru yang akan disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19.

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN “NEW SOUTHERN POLICY PLUS” DI MASA PANDEMI COVID-19

a. *Systemic Sources* ‘Sumber Sistemik’,

- Pandemi COVID-19,

Isu yang sedang naik sebelum adanya NSP+ adalah pandemi COVID-19 yang berdampak pada krisis ekonomi global. Terdapat lebih dari 30 juta kasus dengan 1 juta kematian telah terkonformasi per bulan September 2020, dua bulan NSP+ diluncurkan. International Monetary Fund (IMF) memprediksi bahwa perekonomian negara maju akan turun rata-rata 6,1% dan negara berkembang 1% dalam GDP riil (Hong et al., 2020, p. 74). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Economic Situation and Prospects (WESP) pada pertengahan tahun 2020, ekonomi global diprediksi berkontraksi tajam sebesar 3,2% di tahun 2020. Output ekonomi global diperkirakan akan turun hingga US\$ 8,5 triliun selama dua tahun kedepan akibat pandemi. Negara-negara maju yang berkontribusi besar dalam perdagangan internasional juga diprediksi mengalami penurunan di tahun 2020. Kontraksi tersebut menandai kontraksi paling tajam sejak *Great Depression* tahun 1930an, yang mana hal ini mematahkan prediksi ekonomi yang lesu sekitar 2,1% di awal tahun (United Nations, 2020).

Untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19, salah satu prioritas yang dapat dilakukan pembuat kebijakan adalah mengatasi isu kesehatan dan penurunan ekonomi setidaknya untuk jangka pendek. Program reformasi secara komprehensif untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi dapat menjadi solusi jangka panjang setelah krisis telah mulai mereda nantinya. Kebijakan yang tepat untuk membangun kembali kegiatan ekonomi, baik dalam

jangka pendek maupun jangka panjang memerlukan penguatan layanan kesehatan dan langkah stimulus. Hal ini dimaksudkan untuk membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi dengan memberikan dukungan untuk sektor swasta dan bantuan dana langsung ke masyarakat. Dukungan untuk rumah tangga, perusahaan, layanan-layanan penting di masa pandemi adalah kunci dari keberlanjutan ekonomi di masa pandemi (The World Bank, 2020).

Untuk menekan laju penyebaran kasus COVID-19 dan ketidakpastian pasar, koordinasi dan kerja sama global sangatlah dibutuhkan. Tindakan ekonomi langsung termasuk dukungan internasional dapat memberikan peluang untuk mencapai tujuan pemulihan kesehatan masyarakat global yang kuat (Gopinath, 2020). Di tengah restriksi negara-negara di dunia, Korea Selatan memilih untuk memperkuat hubungannya dengan ASEAN melalui pembaruan kebijakan luar negeri. NSP+ pada masa pandemi mengutamakan tujuh inisiatif yang sebagian besar merupakan langkah-langkah untuk membantu pemulihan kesehatan global, utamanya bagi masyarakat Korea Selatan dan ASEAN. Selain bantuan dana langsung dan subsidi bagi rumah tangga dan perusahaan dalam negeri, Korea Selatan melalui NSP+ juga memberikan bantuan dana dan pelatihan bagi ASEAN sebagai bentuk implementasi dari kebijakan ini. Pemulihan ekonomi Korea Selatan akan tercapai jika ASEAN sebagai mitra kerja sama NSP+ juga pulih dalam segi kesehatan, sehingga bantuan kesehatan adalah yang utama.

- Rivalitas AS-China pada Masa Pandemi COVID-19

Pada pertengahan tahun 2020, Presiden Trump mengecam China atas wabah COVID-19 yang telah menewaskan ratusan ribu orang (Wirawan, 2020). Kecaman ini memperburuk hubungan AS-China yang sebelumnya juga telah dimulai sejak Perang Dagang tahun 2016 lalu. Berdasarkan data dari salah satu universitas riset terkemuka di AS, Universitas Johns Hopkins, seperti dalam grafik di atas, kasus positif COVID-19 terus bertambah pada tiga bulan awal tahun 2020. Kasus di luar China meningkat tajam dari yang awalnya tidak ada kasus sama sekali menjadi lebih dari 88 ribu kasus hanya dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan (Johns Hopkins University, 2020).

Pandemi COVID-19 dan cepatnya lonjakan kasus terinfeksi virus tersebut berimplikasi besar terhadap hubungan rivalitas AS-China yang sangat berpengaruh terhadap perdamaian dan kemakmuran global. Selain hubungan bilateral yang menyentuh titik terburuk kedua negara sejak tahun 1971, krisis global yang timbul oleh pandemi COVID-19 telah merubah tatanan internasional liberal yang sudah sejak lama mengandalkan diplomasi bilateral dan multilateral, ekonomi global yang terbuka, serta stabilitas internasional yang didominasi oleh AS. Perang Dingin akibat permasalahan pandemi telah membawa kembali spekulasi permasalahan Perang Dagang AS-China bahwa perbedaan cara pandang politik dan ekonomi keduanya berbeda. China di sisi lain sedang berusaha mengambil pengaruh global dengan involusi politik global yang merupakan bentuk ketidakberdayaan organisasi internasional dan daya tarik dirigisme (ekonomi pasar kapitalis) serta tindakan ekonomi yang lebih isolasionis

(Pugliese, 2020, p. 1).

Dinamika rivalitas AS-China berdampak secara geopolitik terutama bagi kawasan Indo-Pasifik di masa pandemi COVID-19. Pandemi semakin memperkuat persaingan strategis AS-China, berimplikasi secara luas pada dinamika ekonomi, politik, dan keamanan secara global. Hal ini juga memperkuat permusuhan AS-China sekaligus menegaskan kembali adanya “Perang Dingin” model baru. Pandemi telah mempercepat tren ketidakstabilan internasional, memberikan rasa saling tidak percaya, memperdalam ketegangan geopolitik dan ketidakamanan yang meningkat terlepas dari tujuan strategis masing-masing negara (Pugliese, 2020, pp. 2–3).

Jadi, secara logika keadaan ini menggambarkan *zero-sum game*. AS dan China saling reaktif terhadap keputusan satu sama lain, saling menyebarkan propaganda di tengah wabah COVID-19 menunjukkan dilema keamanan untuk membuktikan bahwa China lebih bergantung kepada AS ataupun sebaliknya. Sayangnya, permainan ini membuat negara-negara lain mendapatkan dampak buruk tidak hanya kehilangan banyak masyarakat mereka karena menjadi korban COVID-19, tetapi juga secara ekonomi dan sosial (Pugliese, 2020, p. 8). Deglobalisasi dan digitalisasi adalah dua hal yang juga muncul seiring masa pandemi, mempengaruhi hidup banyak negara, dan menggeser struktur rantai produksi global (Yeop, n.d., p. 88).

b. *Societal Sources* ‘Sumber Sosial’,

Dinamika kondisi masyarakat Korea Selatan mempengaruhi peluncuran NSP+. Seiring dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Korea Selatan, serangkaian pembatasan sosial baru yang dilakukan pemerintah membuat bisnis kecil di sana mengalami kesulitan. Bantuan dana yang diberikan pemerintah dan pemotongan suku bunga di awal fase pandemi membuat Korea Selatan cukup mempertahankan ekonominya, namun bisnis kecil belum mendapatkan dampak positif yang nyata dari tren positif tersebut. Diketahui lebih dari satu juta tempat usaha, seperti kedai, motel, bar, toko roti, kafe, salon, pusat kebugaran, dan bisnis serupa lainnya diperkirakan akan tutup hingga akhir tahun 2020. Jumlah ini naik dari tahun 2019 sejumlah 850 ribu toko. Tempat usaha yang masih melakukan bisnisnya beberapa terpaksa melakukan pengurangan karyawan dan mengambil pinjaman bank untuk tetap bertahan di masa pandemi (Kyong, 2020).

Korea Selatan memberlakukan pembatasan sosial yang cukup ketat juga belajar dari sejarah sebelumnya, yakni gelombang pandemi Middle East Respiratory Syndrome (MERS) pada tahun 2015. Berdasarkan analisa tim gabungan Korea-WHO MERS, pandemi MERS di Korea Selatan disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam menanggapi fase awal menyebarnya virus MERS. Kurangnya transparansi dan kurang tepatnya waktu penyampaian informasi menjadi penyebab utama kegagalan (Jun So et al., 2017, p. 2). Walaupun tidak separah pandemi COVID-19, pemerintah saat itu sudah mulai membuat beberapa langkah penanganan untuk mengatasi penyakit MERS yang kemudian diadopsi pada penanganan kasus COVID-19 (Pranita, 2020). Pengalaman buruk pandemi MERS

tersebut menjadi pelajaran berharga dan penting bagi pemerintah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, kemitraan yang kolaboratif dengan pemerintah daerah dan organisasi swasta serta penetapan prosedur yang efektif dalam penanganan pandemi COVID-19.

Di saat pemerintah fokus dalam menangani penyebaran pandemi, berdasarkan sebuah penelitian melalui tagar di *twitter* dari bulan Februari hingga April 2020, opini publik pada awal merebaknya pandemi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pencegahan penyebaran pandemi dan ekonomi yang melemah (Lee et al., 2020, pp. 338–339). Survei *online* lain yang diadakan oleh Seoul Metropolitan Government antara bulan Juli dan Agustus 2020 menunjukkan bahwa dari 3,938 responden, 1,489 responden atau 40% dari total responden mengatakan kesehatan mental mereka mengalami penurunan sejak pandemi. 60% dari total responden mengatakan hanya terjadi sedikit perubahan pada kesehatan mental mereka. Hal-hal yang mempengaruhi kesehatan mental para responden adalah jatuhnya ekonomi, kurangnya aktifitas di luar rumah, ketidaknyamanan saat menggunakan masker, dan terbatasnya hubungan dengan keluarga dan teman. Lebih dari 24% dari total responden mengatakan bahwa penurunan ekonomi mempengaruhi hidup mereka (Sajid, 2020).

c. *Government Sources* ‘Sumber Pemerintah’,

Ketidakstabilan ekonomi domestik Korea Selatan yang telah melambat sejak Perang Dagang AS-China di tahun 2019 dan pembatasan ekspor Jepang hingga pandemi COVID-19 yang mulai menyebar secara global di awal tahun 2020 menyebabkan Korea Selatan mengalami defisit perdagangan pada bulan April 2020 (Min-hua, 2020, pp. 11–12). Melihat situasi ini, pemerintah Korea Selatan akan memberikan dana sebesar US\$ 820 untuk setiap rumah tangga dengan total dana US\$ 7,4 miliar untuk seluruh rumah tangga dengan pengecualian 30% rumah tangga dengan penghasilan teratas per bulan April 2020. Beberapa perusahaan kecil dan menengah juga dibebaskan dari tagihan bulanan listrik per bulan Maret 2020. Upaya pemberian dana darurat ini adalah bentuk kompensasi yang diberikan pemerintah bagi masyarakat yang telah patuh, serta mengurangi tekanan pada ekonomi sekaligus meningkatkan kembali ekonomi masyarakat di tengah pandemi. (VOA News, 2020). Sebuah survei nasional kemudian menunjukkan bahwa 74,4% masyarakat Korea Selatan puas dengan komunikasi yang transparan dan respon yang cepat dari pemerintah dalam menanggapi pandemi COVID-19 (Moon et al., 2021, p. 654).

Berbagai pembatasan terhadap kegiatan sekolah dan bisnis yang dibarengi dengan pemberian subsidi telah menunjukkan bahwa birokrasi pemerintah memainkan peran otonom dan kritis dalam menangani dan menerapkan berbagai kebijakan saat pandemi. Pemerintah menjadikan KCDC sebagai lembaga yang otonom dan mandiri, independen setingkat dengan negara bagian yang berfungsi mengawasi respon penyakit menular. KCDC dipisah dengan MOHW (Ministry of Health and Welfare) dan menjadi KDCA, yang memberikan otonomi khusus dalam pembuatan kebijakan dan penegakan penyakit menular di Korea Selatan (Moon et

al., 2021, p. 659). Pemerintah secara aktif menghimbau masyarakat untuk secara sukarela berpartisipasi dalam aturan jaga jarak sosial dan sanitasi, serta menginstal aplikasi, seperti *Coronamap*, *Maskfinder*, dan *KakaoMap's* yang telah dikembangkan pemerintah sebagai hasil produksi bersama dengan perusahaan nasional (Really Good UX, n.d.). Salah satu rumah sakit di Kota Seoul, yakni H Plus Yangji kemudian memperkenalkan stan SAFETY (Safe Assessment and Fast Evaluation Technical) sebagai salah satu solusi pengecekan virus dengan model *walk-through* (Tai, 2020).

Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi kondisi politik di Korea Selatan. Pada kampanye pemilu parlemen ke-21 bulan April 2020, COVID-19 menjadi topik pembahasan yang paling penting untuk disuarakan. Partai yang berkuasa menghimbau masyarakat untuk percaya kepada pemerintah dan presiden selama krisis yang disebabkan oleh pandemi, menekankan bahwa pemerintahan yang dipimpin Presiden Moon secara positif telah dipuji karena telah efektif menangani pandemi COVID-19. Sebaliknya, partai oposisi mengemukakan kegagalan pemerintah yang telah mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, menunjukkan kekecewaan atas pemerintah yang tidak memblokir perjalanan yang berasal dari China di fase awal pandemi (Moon et al., 2021, p. 658).

Kendati demikian, pemilu menghasilkan kemenangan bagi partai yang berkuasa dengan presentase jumlah pemilih nasional yang memberikan suara adalah 66,2%. Secara keseluruhan, masyarakat Korea Selatan lebih percaya dan puas terhadap respon pemerintah menangani pandemi (BBC News, 2020). Parlemen Korea Selatan kemudian menyetujui sekitar US\$ 2,7 miliar sebagai bentuk dana subsidi baru pada kuartal ketiga bantuan ekonomi bagi pemilik usaha kecil dan pekerja mandiri. Pemerintah juga telah menyetujui anggaran tahun 2021 senilai US\$ 504 miliar, di samping adanya paket bantuan dana ₩ 7,8 triliun pada bulan September. Sejumlah ₩ 14,3 triliun pada bulan Mei sudah dikeluarkan pemerintah untuk seluruh rumah tangga di Korea Selatan (Kyong, 2020).

Dari penjelasan di atas, perhitungan politik bukan menjadi faktor utama dalam keputusan pembuatan kebijakan Korea Selatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Upaya pengendalian krisis di masa pandemi jauh dari kepentingan politik, sehingga membantu mencegah adanya *over-politicization* isu COVID-19. Interaksi politik antara tiga aktor, yakni presiden, birokrat, dan masyarakat secara seimbang telah membentuk kekuatan administratif birokrat berdasarkan keahlian profesional (ternasuk komunitas medis) dan keterlibatan masyarakat (Moon et al., 2021, p. 659).

d. *Idiosyncratic Sources* 'Sumber Idiosinkrasi'.

Presiden Moon Jae In lahir pada 24 Januari 1953 di Pulau Geoje, Provinsi Gyeongsangnam. Presiden Moon merupakan anak dari orang tua yang dulunya merupakan pengungsi dari Korut saat perang Korea. Sejak bersekolah di SMA Kyungnam, Moon sudah memiliki jiwa aktivis. Saat ia mendapatkan beasiswa pendidikan penuh di Universitas Kyunghee, ia kemudian memimpin gerakan protes Revitalisasi Reformasi terhadap Yushin Constitution yang digagas oleh Presiden

Park Chung Hee yang berkuasa pada masa itu. Namun, aksinya ini justru membuatnya dikeluarkan dari universitas dengan dakwaan pelanggaran demokrasi dan majelis. Pada tahun 1980, ia kembali ditahan atas kasus pelanggaran terhadap hukum kekerasan, namun kembali melanjutkan studinya di Institut Penelitian dan Pelatihan Yudisial dengan predikat terbaik kedua dikelasnya pada saat lulus di tahun 1982 (The Republic of Korea Cheongwadae, 2017). Gagal menjadi hakim karena kasus keterlibatannya dalam protes anti-pemerintah, Moon memulai karir menjadi pengacara Hak Asasi Manusia (HAM). Ia juga merupakan salah satu pendiri sekaligus anggota komite Hankyoreh, media cetak independen yang berdiri pada tahun 1988 (East Asia Research Center, 2019).

Moon melanjutkan karir politiknya dengan mendirikan firma hukum bersama Roh Moo Hyun (Roh) pada tahun 1987. Pada tahun 2002, Roh terpilih menjadi presiden Korea Selatan, dan mengangkat Moon menjadi sekretaris senior untuk urusan sipil. Pada tahun 2004, ia berkontribusi dalam pembukaan Kaesong Industrial Park, yang merupakan proyek ekonomi bersama yang dibangun oleh pemerintah Korea Selatan dan Korut. Berlanjut pada tahun 2007, Moon dipilih sebagai kepala staf kepresidenan dan ketua komite promosi untuk pertemuan puncak dengan pemimpin Korut, Kim Jongil. Presiden Roh yang saat itu mengaktifkan kembali Sunshine Policy dengan menekankan *peace* dan *prosperity* terhadap Korut untuk tujuan memperbaiki hubungan Korea Selatan dengan Korut, sangat mempengaruhi pemikiran politik Moon (The Asan Forum, 2017).

Setelah Presiden Park Geun Hye resmi diturunkan dari jabatannya pada bulan Maret 2017 karena kasus korupsi, Moon menjadi kandidat kuat calon presiden dengan misi ingin mempersatukan kembali dua Korea yang terpisah dan mengatasi tingkat pengangguran yang semakin meningkat. Akhirnya Moon terpilih menjadi presiden ke-19 Korea Selatan, dan resmi dilantik pada bulan Mei 2017 (The Republic of Korea Cheongwadae, 2017). Presiden Moon ingin mengakhiri kepemimpinan otoriter yang diterapkan oleh presiden sebelumnya dengan visi menjadikan Korea Selatan sebagai "The People's Country, Just the Republic of Korea." Dengan visi ini, Korea Selatan di bawah kepemimpinannya akan dilaksanakan berdasarkan pendapat rakyat dengan fokus keadilan (terutama ekonomi dan sosial). Rakyat merupakan pemilik negara, negara adalah tempat bagi mereka, dimana perlakuan khusus, ketidakadilan, diskriminasi, dan disparitas dihilangkan. Seluruh keinginan dan harapan Presiden Moon terhadap pemerintahan yang dipimpinnya tersebut telah menunjukkan bahwa ia merupakan pemimpin dengan nasionalisme tinggi dan meyakini bahwa kepentingan rakyat adalah yang utama (Australian Institute for International Affairs, 2018).

Presiden Moon memegang prinsip *Korea-led* untuk menempatkan Korea Selatan sebagai penentu arah perdamaian di Semenanjung Korea, serta meyakini bahwa Korea Selatan memang seharusnya melakukan *balanced diplomacy*, terutama terkait isu nuklir Korut dan mempertahankan posisi untuk tidak terlalu memihak aliansi militer AS dan Jepang (Ministry of Unification, 2018). Sebagai pemimpin strategis dan visioner, ia telah menghubungkan sejarah di masa lampau, hari ini, dan masa depan dengan mempertimbangkan identitas untuk keberlanjutan

dan integritas. Jadi, bentuk pembaruan NSP menjadi NSP+ telah dinilai oleh Presiden Moon sebagai keputusan yang tepat, dengan menganalisis kemampuan dan kompetensi unggul Korea Selatan (Ruzgar, 2019, pp. 5294–5295).

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN “NEW SOUTHERN POLICY PLUS” DI ASEAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak tantangan dalam menjalankan 90 proyek tersebut di tengah krisis kesehatan dan ekonomi global sejak awal tahun 2020. Hal lain seperti semakin intensnya persaingan AS-China serta meningkatnya nasionalisme dan proteksionisme menambah perubahan paradigma kerja sama internasional. Tantangan yang dihadapi Korea Selatan dan ASEAN datang dari kerentanan globalisasi yang mengarah pada de-globalisasi dan regionalisme serta arus bebas barang dan manusia. Sehingga prioritas utama di tengah krisis akibat pandemi adalah karantina dan sistem kesehatan yang sigap serta pentingnya metode bisnis non-kontak yang mendorong transisi ke ekonomi digital (Young Sun, 2021, pp. 22–23).

Oleh karena itu, menindaklanjuti tujuan awal NSP untuk mendiversifikasi ekonomi Korea Selatan di tengah persaingan AS-China di kawasan, tujuan NSP+ juga masih sama untuk merevitalisasi ekonomi domestik Korea Selatan melalui diversifikasi kerja sama ekonomi dengan ASEAN. Tetap mempertahankan NSP dan memperbaruinya menjadi NSP+ masih menjadi pilihan Korea Selatan untuk mengurangi risiko gesekan strategis kepentingan AS-China di masa pandemi COVID-19. Selaras dengan penguatan diplomasi *middle power* Korea Selatan di Asia Selatan, keuntungan ekonomi hasil kerja sama terdahulu di bawah NSP masih menjanjikan di masa pandemi ini. Kerja sama di masa pandemi akan berfokus pada sektor kesehatan, yang kemudian prioritas kerja sama akan fokus pada infrastruktur dan inovasi digital di masa yang akan datang. Hal ini menandakan bahwa kebijakan luar negeri ini setelah pembaruan akan jauh lebih adaptif, melihat potensi-potensi yang nantinya muncul pada wilayah kerja sama prioritas (Botto, 2021a, pp. 7–8).

Dengan kata lain, melalui NSP+ Korea Selatan bertujuan untuk menegaskan kembali tekad pemerintah Korea Selatan untuk memperkuat kerja sama dengan ASEAN sebagai bagian dari upaya kebijakan luar negeri Korea Selatan. NSP+ sendiri menerapkan lima prinsip dan tujuh inisiatif untuk mendorong pertumbuhan bersama, mengoordinasikan kebijakan dengan inisiatif ASEAN untuk mendorong kolaborasi internasional, dan memastikan keberlanjutan kebijakan dengan memperkuat implementasinya. Adapun penjelasan dari tujuh inisiatif tersebut akan dipaparkan dalam tabel sebagai berikut: (Young Sun, 2021, pp. 26–29)

Tabel 1. Implementasi Inisiatif Kerja Sama Korea Selatan-ASEAN dalam New Southern Policy Plus

Pilar	Inisiatif Kerja Sama	Keterangan	Hasil Kerja Sama
People	Kerja sama yang	Penyediaan dana,	Sumbangan US\$ 10 juta

	<p>komprehensif dalam hal kesehatan publik pasca pandemi COVID-19</p>	<p>pasokan medis, dan promosi kesehatan</p>	<p>Vaccines Advance Market Commitment (COVAX AMC) untuk akses vaksin mitra NSP. (Gavi The Vaccine Alliance, n.d.) -Korea Selatan menyetujui Global Vaccine Partnership -Proyek dukungan komprehensif (dana sejumlah US\$ 19 juta) -Partisipasi Korea Selatan dalam ASEAN Response Fund (dana sejumlah US\$ 5 juta)(Sarah, 2021) -Partisipasi Korea Selatan dalam ASEAN Regional Reserves of Medical Supplies for Public Health Emergencies. (Young Sun, 2021, p. 23)</p>
	<p>Membagikan informasi terkait model pendidikan ala Korea Selatan dan dukungan terhadap pengembangan SDM,</p>	<p>Korea Selatan meningkatkan kapasitas universitas lokal di negaranya untuk memperluas program beasiswa, menyediakan program kejuruan, dan memenuhi permintaan dalam pembelajaran bahasa Korea dan studi tentang Korea bagi masyarakat ASEAN</p>	<p>-Global Korea Scholarship (Study in Korea, n.d.) -Beasiswa KOICA (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, n.d.)</p>
	<p>Mempromosikan pertukaran budaya dua arah</p>	<p>Kerja sama yang berfokus pada bidang produksi dan distribusi konten digital</p>	<p>Digital Cultural Experience Centers di negara-negara anggota ASEAN dan Korea Selatan (Presidential Committee on New Southern Policy, 2020, p. 16)</p>

Peace	Kerja sama terkait promosi keselamatan dan perdamaian di tingkat internasional	-Korea Selatan memperkuat dialog kebijakan bilateral dan multilateral dengan ASEAN -Kerja sama dengan negara-negara besar di kawasan, seperti AS dan Australia melalui konsultasi	Korea Selatan berencana untuk membangun platform dan sistem berbagi data iklim dengan negara-negara ASEAN
Prosperity	Membangun dasar hubungan saling menguntungkan dalam hal perdagangan dan investasi yang berkelanjutan	Korea Selatan memaksimalkan potensi kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi perusahaan di negara-negara ASEAN dan Korea Selatan	Perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement) dan investasi antara Korea Selatan dan ASEAN
	Mendukung pengembangan infrastruktur desa dan perkotaan	Korea Selatan mengajak perusahaan domestiknya berpartisipasi, misalnya dalam proyek <i>smart city</i> .	Keikutsertaan Korea Selatan dalam proyek <i>smart city</i> ASEAN dan proyek percontohan yang dicantumkan dalam Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025
	Kerja sama dalam hal industri masa depan untuk kemakmuran bersama	Upaya Korea Selatan untuk membangun industri masa depan dan non-kontak, serta mendukung bisnis <i>start-up</i>	-Dialog 5G ASEAN-Korea -ASEAN-Korea Industrial Innovation Centre -ASEAN Standardization Joint Research Centre -Dialog kebijakan <i>start-up</i> ASEAN-Korea, <i>K-start-up</i>

NEW SOUTHERN POLICY DAN HUBUNGAN KERJA SAMA KOREA SELATAN-ASEAN

Hubungan Korea Selatan-ASEAN setelah pembaruan NSP pada periode akhir tahun 2020 hingga akhir tahun 2021 didominasi oleh proyek kemitraan kesehatan dan ekonomi (termasuk perdagangan, investasi, infrastruktur, dan ekonomi kreatif) sesuai dengan inisiatif-inisiatif yang telah dicantumkan pada dokumen *policy statement* NSP+.

Secara garis besar, Korea Selatan mencoba mengintegrasikan NSP+ dengan ASEAN Comprehensive Recovery Framework (keduanya diluncurkan pada tanggal 12 November tahun 2020) untuk tetap menjalin koordinasi dan kerja sama dengan ASEAN di masa pandemi COVID-19 (Ministry of Foreign Affairs, 2021). Kemitraan kesehatan dan ekonomi adalah yang paling utama dalam hubungan kerja sama Korea Selatan-ASEAN melalui NSP+ di masa pandemi COVID-19.

Dari segi kemitraan kesehatan, koordinasi Korea Selatan-ASEAN sebenarnya sudah dimulai bahkan sebelum NSP diperbarui, yakni pada bulan Juni 2020, dimana Korea Selatan meluncurkan proyek *Enhancing the Detection Capacity for COVID-19 in ASEAN Countries*, yakni proyek bantuan senilai US\$ 5 juta bagi negara-negara anggota ASEAN (masing-masing negara US\$ 500 ribu) (Embassy of the Republic of Korea in Malaysia, 2020). Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas diagnostik melalui penyediaan alat tes dan pelatihan kesehatan di era COVID-19 ke negara-negara anggota ASEAN. Beberapa peralatan medis yang akan diberikan adalah APD, reagen kimia, alat tes COVID-19 (termasuk alat PCR) (ASEAN-Korea Cooperation Fund, 2020). Mengadopsi dua pertemuan tersebut, pemerintah Korea Selatan juga dengan cepat merespon pengajuan ASEAN terkait pengiriman pasokan dan peralatan medis, pengalaman dan pengetahuan serta partisipasi aktif Korea Selatan dalam ASEAN Response Fund dan ASEAN Regional Reserves of Medical Supplies for Public Health Emergencies (Young Sun, 2021, p. 23).

Dari segi kemitraan ekonomi sendiri, berdasarkan pernyataan Direktur Jenderal Urusan Ekonomi Bilateral Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, total perdagangan Korea Selatan-ASEAN pada tahun 2020 senilai US\$ 143,8 miliar dan total investasi Korea Selatan ke ASEAN senilai US\$ 9,2 miliar. Total ekspor Korea Selatan ke ASEAN senilai US\$ 89,05 miliar. Jumlah ini menjadikan negara-negara anggota ASEAN sebagai tujuan investasi terbesar Korea Selatan setelah AS (Rabbi, 2021). Sedangkan pada tahun 2021, total ekspor Korea Selatan ke ASEAN adalah senilai US\$ 108,85 miliar (Jobst, 2022). Perlu diperhatikan juga bahwa prioritas kerja sama dan bantuan yang dilakukan dan diberikan Korea Selatan terhadap negara-negara anggota ASEAN secara bilateral berbeda.

Penulis mendapati bahwa dari sepuluh negara anggota ASEAN, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina adalah negara dengan nilai perdagangan dan investasi mencapai jumlah miliaran US\$ dengan Korea Selatan, walaupun dengan besaran nilai yang berbeda-beda. Empat negara lainnya juga memiliki hubungan kerja sama ekonomi yang cukup baik. Nilai ini dihasilkan mulai dari komoditas pertanian dan komoditas unggulan lainnya, proyek *smart city* hingga kesepakatan inovasi digital. Sedangkan Vietnam, Malaysia, Kamboja, Laos, dan Myanmar adalah negara-negara dengan pemberian bantuan medis dan/ kemanusiaan yang cukup banyak dan bervariasi dari Korea Selatan. Selain itu, Indonesia dan Vietnam adalah dua negara yang memiliki kedekatan lebih intens dari delapan negara lainnya, jika dilihat dari beragamnya kerja sama yang terjalin. Indonesia sendiri merupakan mitra spesial strategis pertama bagi Korea Selatan di Asia Tenggara sejak 2017. Sedangkan Vietnam yang meskipun merupakan salah satu negara CLV (Cambodia-Laos-Vietnam), negara ini memiliki pengalaman sejarah yang baik dengan

Korea Selatan di masa Perang Korea terdahulu.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Korea Selatan melalui NSP+ berusaha untuk membuka peluang baru bagi keberlangsungan kemitraan Korea Selatan-ASEAN di masa pandemi dan pasca pandemi. ASEAN telah menjadi mitra terbesar kedua bagi Korea Selatan, dan Korea Selatan merupakan mitra dagang terbesar keempat bagi ASEAN (Gunawan, 2021). Walaupun progres NSP terhambat pandemi, melalui NSP+ Korea Selatan membuktikan peran pentingnya dalam mempromosikan multilateralisme dengan ASEAN dan bilateralisme dengan negara-negara anggota ASEAN. NSP+ memperkuat partisipasi vital Korea Selatan di Asia Tenggara serta menyelaraskan tiga pilar utama kebijakan ini dengan Komunitas Ekonomi dan Sosial Budaya ASEAN. Korea Selatan mengarahkan pandangan strategis masa depan sebagai salah satu sifat komplementer untuk membawa manfaat saat pandemi dan pasca pandemi bagi Korea Selatan, ASEAN, dan stabilitas regional (Hoo, 2021, pp. 4–5).

KESIMPULAN

NSP+ menjadi produk kebijakan yang dirumuskan dan disesuaikan berdasarkan faktor eksternal, seperti pandemi COVID-19, dan rivalitas AS-China di tengah pandemi, serta faktor internal yang mencakup kondisi sosial-ekonomi masyarakat Korea Selatan, kinerja dan tanggapan pemerintah terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Korea Selatan, serta pandangan (visi dan misi) dan pengalaman Presiden Moon selaku pengambil keputusan dalam menilai dan mengambil tindakan di tengah situasi yang ada. NSP+ adalah langkah untuk tetap menjaga kesinambungan hubungan kerja sama Korea Selatan-ASEAN yang bersifat *absolute gain*, yang sebelumnya telah terjalin melalui NSP, terbukti dari masih dipegangnya tiga pilar utama NSP, yakni *people*, *peace*, dan *prosperity*. Selama kurang lebih satu tahun implementasi kebijakan ini (November 2020-Desember 2021), pilar *people* dan *prosperity* menjadi yang utama dalam implementasi NSP+. Hal ini dibuktikan dari kemitraan sektor kesehatan dan ekonomi yang prioritas paling utama dan dominan mengingat dua sektor ini yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19.

REFERENSI

- ASEAN-Korea Cooperation Fund. (2020). *[Project] Enhancing the Detection Capacity for COVID-19 in ASEAN Countries*. ASEAN-Korea Cooperation Fund. <https://www.aseanrofund.com/our-works/project-enhancing-the-detection-capacity-for-covid-19-in-asean-countries#:~:text=The project is aiming to,along with on-site training.>
- Asia-Pacific Center for Security Studies. (2020). *Republic of Korea New Southern Policy Information Booklet*. https://apcss.org/wp-content/uploads/2020/02/Republic_of_Korea-New_Southern_Policy_Information_Booklet.pdf
- Australian Institute for International Affairs. (2018). *A “Gwanghamun President” for South Korea? Moon Jae In*. Australian Institute for International Affairs. <http://www.internationalaffairs.org.au/resource/a-gwanghwamun-president-for-south-korea-moon-jae-in/>

- BBC News. (2020). *South Korea Election: Ruling Party Wins Amid Coronavirus Outbreak*. BBC News. <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/world-asia-52304781.amp>
- Botto, K. (2021a). *South Korea Beyond Northeast Asia: How Seoul Is Deepening Ties With India and ASEAN* (Issue October). <https://carnegieendowment.org/2021/10/19/south-korea-beyond-northeast-asia-how-seoul-is-deepening-ties-with-india-and-asean-pub-85572>
- Botto, K. (2021b). *Why Is South Korea Strengthening Ties with India and Southeast Asia?* Carnegie Endowment For International Peace. <https://carnegieendowment.org/2021/09/30/why-is-south-korea-strengthening-ties-with-india-and-southeast-asia-pub-85469>
- Çelik, H. (2017). *South Korea as a Middle Power: A Case Study of South Korea-ASEAN Relations* [Middle East Technical University]. <https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12621461/index.pdf>
- Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. (1997). *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey* (4th ed.). Longman.
- East Asia Research Center. (2019). *Moon Jae In Founding Member of Hankyoreh Newspaper*. East Asia Research Center. <https://eastasiaresearch.org/2019/01/28/moon-jae-in-a-founding-member-of-hankyoreh-newspaper/>
- Embassy of the Republic of Korea in Malaysia. (2020). *Enhancing the Detection Capacity for COVID-19 in ASEAN Countries*. Embassy of the Republic of Korea in Malaysia. https://overseas.mofa.go.kr/my-en/brd/m_1921/view.do?seq=761325&page=6
- Gavi The Vaccine Alliance. (n.d.). *GAVI COVAX AMC*. Gavi The Vaccine Alliance. <https://googleweblight.com/sp?u=https://www.gavi.org/gavi-covax-amc&grqid=GOYTB8Vx&hl=id-ID>
- Gopinath, G. (2020). *The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression*. IMF Blog. <https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/>
- Gunawan, S. M. (2021). *Sejak NSP Diumumkan, Hubungan ASEAN-Korea Selatan Makin Mesra*. RMOL.Id. <https://dunia.rmol.id/read/2021/11/02/510275/sejak-nsp-diumumkan-hubungan-asean-korea-selatan-makin-mesra>
- Holsti, K. J. (1988). *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis* (Jilid II). Erlangga.
- Hong, N., Gupta, S., Geraci, M., Zhang, Y., Martin, J. L., Cooper, A., & Dwyer, S. (2020). *U . S . -China Relations in the Age of COVID-19 : Politics , Polemics and Pandemic Response Measures*. *Institute for China-America Studies, September*. <https://chinaus-icas.org/research/u-s-china-relations-in-the-age-of-covid-19-politics-polemics-and-pandemic-response-measures/>
- Hoo, C.-P. (2021). *What's in the New Southern Policy Plus? An ASEAN Perspective on Building Niche-Based Pragmatic Cooperation with South Korea*. *SSRN Electronic Journal*, 11(January), 1–5. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3881572>
- Iriawan, S. (2017). *Reformasi Aliansi Pertahanan Amerika Serikat-Jepang-Korea Selatan Menghadapi Ancaman Nuklir Korea Utara*. *International & Diplomacy*, 3(1). https://isip.usni.ac.id/jurnal/6%2520Sony%2520Iriawan.pdf&ved=2ahUKEwjNy52s4IH1AhUymeYKHT3_Cq4QFnoECBIQAQ&usq=AOvVaw1IxivapGL3Is8VLqgG6St-f
- Jaehyon, L. (2020). *New Emphasis Needed: South Korea's New Southern Policy and ASEAN*. *ISEAS Yusof Ishak Institute Perspective*, 110, 1–9.
- Jobst, N. (2022). *Value of South Korea's exports to ASEAN countries from 2012 to*

2021. Statista.Com. <https://www.statista.com/statistics/658638/south-korea-value-of-exports-to-asean-countries/>
- Johns Hopkins University. (2020). *All Regions Data*. Johns Hopkins University. <https://coronavirus.jhu.edu/region>
- Jun So, R., Jin Seok, L., Sung Chan, K., & Hye Min, J. (2017). Worry Experienced During the 2015 Middle East Respiratory Syndrome (MERS) Pandemic in Korea. *PLOS ONE*, 10. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0173234>
- KBS World. (2017). 4. *Konflik Korea Selatan dan China Terkait THAAD*. KBS World. http://world.kbs.co.kr/service/archive_view.htm%3Flang%3Di%26id%3Dsub_index%26board_seq%3D918&ved=2ahUKEwi8i_2934P1AhUk8HMBHUeoAykQFnoEC D4QAQ&usg=AOvVaw0Z2fUK-C1Y4_hpNEbm25UM
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. (n.d.). *Beasiswa Koica*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. https://googleweblight.com/sp?u=http://posspika.kemdikbud.go.id/beasiswa-koica&grqid=YhN_PPxF&hl=id-ID
- Kyong, P. C. (2020). *As South Korea's Economy Rebounds, Small Businesses Struggle with Tighter Coronavirus Curbs*. South China Morning Post. <https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3112439/south-koreas-economy-rebounds-small-businesses-struggle-tighter>
- Lee, H., Noh, E. B., Choi, S. H., Zhao, B., & Nam, E. W. (2020). *Determining Public Opinion of the COVID-19 Pandemic in South Korea and Japan: Social Network Mining on Twitter*. 26(4), 335–343. <https://doi.org/https://doi.org/10.4258/hir.2020.26.4.335>
- Min-hua, C. (2020). Covid-19 's Impact On South Korea 's Economy And Countermeasures. *EAI Background Brief*, 1549, 1–21. <https://research.nus.edu.sg/eai/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/EAIBB-No.-1549-S-Koreas-economic-response-to-COVID-19-2.pdf>
- Ministry of Foreign Affairs. (2020). *Hallyu, The Korean Wave*. Ministry of Foreign Affairs. https://overseas.mofa.go.kr/no-en/brd/m_21237/view.do?seq=81
- Ministry of Foreign Affairs. (2021). *The Second New Southern Policy Forum*. Ministry of Foreign Affairs. https://overseas.mofa.go.kr/asean-en/brd/m_2565/view.do?seq=761119
- Ministry of Unification. (2018). *Five Principles*. Ministry of Unification. https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyissues/koreanpeninsula/principles/
- Moon, M. J., Suzuki, K., Park, T. I., & Sakuwa, K. (2021). A Comparative Study of COVID-19 Responses in South Korea and Japan: Political Nexus Triad and Policy Responses. *International Review of Administrative Sciences*, 87, 652–671. <https://doi.org/10.1177/0020852321997552>
- Pranita, E. (2020). *Korea Selatan Sukses Tangani Corona, Ternyata Belajar dari Wabah MERS*. Kompas.Com. https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/17/071300023/korea-selatan-sukses-tangani-corona-ternyata-belajar-dari-wabah-mers?amp=1&page=2&jxconn=1*n8ms8f*other_jxampid*OUliclRjRkRGdEhIVi9yWDZNcFFnMEdhRHZPUzZTbXNfT0tGdWhIYnZGQVJOQTVqU1VEYjFDQ21xYIlyd2x6OA
- Presidential Committee on New Southern Policy. (2018). *What is the NSP*. Presidential Committee on New Southern Policy. <http://www.nsp.go.kr/eng/policy/policy2.do>
- Presidential Committee on New Southern Policy. (2020). *New Southern Policy Plus Policy Statement*. http://nsp.go.kr/assets/eng/pds/NSPplus_Policy Statement.pdf
- Pugliese, G. (2020). *COVID-19 and the Reification of the US-China " Cold War ."*

- 18(15), 1–10. <https://apjif.org/2020/15/Pugliese.html>
- Pujayanti, A. (2019). Potensi dan Tantangan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XI(23). https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XI-23-I-P3DI-Desember-2019-179.pdf
- Putri, A. S. (2019). Pengaruh Terminal High Altitude Area Defense (Thaad) Terhadap Hubungan Dagang Korea Selatan-Tiongkok. *Jom Fisip*, 6, 1–15. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/23858/23090&ved=2ahUKEwivliTpeD1AhW3UGwGHSByAlcQFnoECAUQAQ&usq=AOvVaw37Dewl_zYPn-xJOLEEUTYu
- Rabbi, C. P. A. (2021). *Selain Ekonomi, Kemitraan ASEAN-Korea Selatan Bidik Tujuh Tujuan Strategis*. Katadata.Co.Id. <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/maesaroh/berita/615ed79797059/selain-ekonomi-kemitraan-asean-korea-selatan-bidik-tujuh-tujuan-strategis>
- Really Good UX. (n.d.). *How Korean Mobile Apps are Making COVID-19 Resources More Accessible*. Really Good UX. Retrieved July 1, 2022, from <https://www.reallygoodux.io/blog/korean-mobile-apps-coronavirus-covid-19>
- Rosenau, J. N., Boyd, G., & Thompson, K. W. (1976). *World Politics: An Introduction*. The Free Press.
- Rudy, T. M. (2022). *Studi Strategis: Dalam Transformasi Internasional Pasca Perang Dingin*. Refika Aditama.
- Ruzgar, N. (2019). Moon Jae In : A Contemporary Strategic and Visionary Leader. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 6(02), 5291–5296. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v6i2.05>
- Sajid, I. (2020). *40% S.Koreans Face Mental Health Issues Due to COVID-19*. Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/40-skoreans-face-mental-health-issues-due-to-covid-19/1990320#>
- Sarah, K. (2021). *Korea to Provide Another \$5M to Asean Response Fund for Covid-19*. Korea JoongAng Daily. <https://koreajoongangdaily.joins.com/2021/10/26/national/diplomacy/Asean-Moon-Jaein-Blue-House/20211026172657869.html>
- Study in Korea. (n.d.). *Global Korea Scholarship*. Study in Korea. https://googleweblight.com/sp?u=https://www.studyinkorea.go.kr/in/sub/gks/allnew_invite.do&grqid=vmV2X3Or&hl=id-ID
- Study, T., Policy, F., & Relations, I. (2018). *Journal of Political Sciences & Public Affairs*. 6(4). <https://doi.org/10.4172/2332-0761.1000337>
- Tai, S. H. (2020). *Korea's Evolving Virus Tests -- from Drive-through to Walk-through*. Korea Biomedical Review. <http://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=7767>
- The Asan Forum. (2017). *Moon Jae -in's Foreign Policy & Roh Moo-hyun's Shadow*. The Asan Forum. <http://www.theasanforum.org/moon-jae-ins-foreign-policy-roh-moo-hyuns-shadow/>.
- The Republic of Korea Cheongwadae. (2017). *President Life Story*. The Republic of Korea Cheongwadae. <http://english1.president.go.kr/President/LifeStory>.
- The World Bank. (2020). *The Global Economic Outlook During the COVID-19 Pandemic: A Changed World*. The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world>
- Thuzar, M. (2012). The New Southern Policy Plus: What's New and What's Next. *World Economy Brief*, 11(12). [108](https://think-</p></div><div data-bbox=)

- asia.org/bitstream/handle/11540/13365/WEB21-12.pdf?sequence=1
- United Nations. (2020). *COVID-19 to Slash Global Economic Output by \$8.5 Trillion Over Next Two Years*. United Nations. <https://www.un.org/ar/desa/covid-19-slash-global-economic-output-85-trillion-over-next-two-years>
- VOA News. (2020). *S. Korea to Offer Emergency Payments to Help Ease Impact of COVID-19*. Voanews.Com. https://www.voanews.com/a/science-health_coronavirus-outbreak_s-korea-offer-emergency-payments-help-ease-impact-covid-19/6186618.html
- Wirawan, K. M. (2020). *Trump Salahkan China atas "Pembunuhan Massal" Pandemi Covid-19*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/global/read/2020/05/21/131428670/trump-salahkan-china-atas-pembunuhan-massal-pandemi-covid-19?page=all>
- Wongi, C. (2021). "New Southern Policy": Korea's New Found Ambitions in Search Strategic Autonomy. *Asie Visions*, 118.
- Yeop, W. J. (n.d.). How COVID-19 Has Affected the Geopolitics of Korea. *Joint U.S.-Korea Academic Studies*, 88–98. https://keia.org/wp-content/uploads/2021/07/KEI_JointUS-Korea_2021_1_4.pdf
- Young Sun, K. (2021). The New Southern Policy Plus and ASEAN-Korea Relations. In L. Kwon Young & R. Yoon Jae (Eds.), *The New Southern Policy Plus: Progress and Way Forward*. Korea Institute for International Economic Policy.
- Zahra, L. (2021). *Korea Selatan Perkuat Diplomasi di ASEAN lewat The New Southern Policy*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/internasional/398585/Korea-Selatan-perkuat-diplomasi-di-asean-lewat-the-new-southern-policy>